



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA EDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 504002

II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 2.365.000.000 |
|--|------------|----------------------|
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/104 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 18.000 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 115.000.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA/B3BA/T SPD.MOTOR/R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000 | | |
| 2. MOBIL, AGYA S SPORTY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 30.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 47.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 2.557.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 78.200.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.478.800.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.